



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DWI WAHYUNI HARIYATI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 107226

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 875.000.000

1. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/20 m2 di KAB / KOTA  
REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/130 m2 di KAB / KOTA  
REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 193.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, WARISAN  
Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, MAZDA 2 1.5LHB BH A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
4. MOBIL, NISAN LIVINA X GEAR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 102.150.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 10.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.158.779**F. HARTA LAINNYA** Rp. 7.500.000

**Sub Total** Rp. 1.211.808.779



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.211.808.779

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.